



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANUGERAHAN

PREDIKAT KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2024

**RINGKASAN
EKSEKUTIF**

Hotel Le Méridien Jakarta
Kamis, 14 November 2024



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA





PENGANUGERAHAN

**PREDIKAT KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK**

TAHUN 2024





PENGANUGERAHAN

PREDIKAT KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2024



LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Di sana hendak diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Sejak tahun 2015, Ombudsman RI melakukan kegiatan penilaian kepatuhan dimaksud. Pada level programatik, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Selama ini, obyek penilaian dilakukan sebatas menguji pemenuhan standar pelayanan secara *tangible* (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan. Lalu, sejak tahun 2017, dilakukan juga survei Penilaian Persepsi Maladministrasi (PPM), berbeda dari Penilaian Kepatuhan yang berfokus kepada standar pelayanan. Survei PPM ini hendak melihat persepsi pengguna layanan terhadap layanan yang telah diperoleh dari penyelenggara layanan.

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi pelaksana layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi *input* dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful public service*).

Bagi Ombudsman RI sendiri, perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk mencegah Maladministrasi. Profil yang lengkap dan gambaran situasi yang lebih detil, tentu penting dalam mengembangkan intervensi program lebih lanjut, baik pada sisi pencegahan (kerja pendampingan) maupun antisipasi bagi pelaksanaan fungsi pemeriksaan terhadap laporan masyarakat.

Pada tahun 2024 ini, indikator dan variabel penilaian tidak mengalami perubahan dari tahun lalu dan hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.



MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan hingga pengelolaan pengaduan.

TUJUAN

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penilaian ini adalah perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Tujuan Khusus

1. Teridentifikasinya tingkat kompetensi penyelenggara layanan, tersedianya sarana-prasarana, terpenuhinya komponen standar pelayanan, dan efektifnya pengelolaan pengaduan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Membantu pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk mengidentifikasi mutu penyelenggara layanan, komponen standar pelayanan, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan yang masih perlu dipenuhi oleh unit/satuan kerja pelayanan publiknya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik.
3. Mendorong kepatuhan pelaksanaan atas saran dan rekomendasi Ombudsman RI oleh para pihak terkait, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah guna perbaikan pelayanan publik di wilayahnya masing-masing sebagai upaya mencegah potensi terjadinya maladministrasi.



METODOLOGI

Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik (*tangible*) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.



LOKUS DAN BATASAN PENILAIAN

Waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei sampai bulan September 2024. Adapun lokus penilaian kepatuhan tahun 2024 di batasi pada:

- a. 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan produk administratif.
- b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menyelenggarakan produk jasa.
- c. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan produk jasa.
- d. Penilaian instansi vertikal dilakukan pada unit pelayanan Kepolisian Resort (Polres) dan Kantor Pertanahan (Kantah).



DEFINISI DAN DIMENSI

Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan.

Adapun dimensi penilaian sebagai berikut:

1. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan;
 - a. Pada variabel kompetensi mengukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan
 - b. Pada variabel sarana prasarana mengukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus.
2. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan;

Pada variabel standar pelayanan publik mengukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu.
3. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi;
 - a. Pada variabel penilaian persepsi maladministrasi mengukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di suatu unit layanan setelah selesai mengakses suatu layanan.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Standar Pelayanan Minimal
4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan;

Pada variabel pengelolaan pengaduan diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.



KATEGORI PENILAIAN

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir dari masing-masing penyelenggara pelayanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk kategorisasi penilaian adalah:

INTERVAL NILAI	KATEGORI	OPINI	ZONASI
88.00 - 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau
78.00 - 87.99	B	Kualitas Tinggi	Hijau
54.00 - 77.99	C	Kualitas Sedang	Kuning
32.00 - 53.99	D	Kualitas Rendah	Merah
0 - 31.99	E	Kualitas Terendah	Merah



HASIL PENILAIAN TAHUN 2024

a. Tingkat Kementerian

NO	KEMENTERIAN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	93,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Kementerian Keuangan	92,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	92,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	90,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kementerian Luar Negeri	89,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	88,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Kementerian Agama	88,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	88,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9	Kementerian Pertanian	87,94	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	87,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11	Kementerian Perindustrian	87,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
12	Kementerian Dalam Negeri	87,04	Hijau	B	Kualitas Tinggi
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	86,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	86,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
15	Kementerian Kesehatan	86,39	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	KEMENTERIAN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
16	Kementerian Investasi/ BKPM	86,26	Hijau	B	Kualitas Tinggi
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	85,48	Hijau	B	Kualitas Tinggi
18	Kementerian Sosial	82,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
19	Kementerian Pertahanan	81,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
20	Kementerian Sekretariat Negara	81,45	Hijau	B	Kualitas Tinggi
21	Kementerian Ketenagakerjaan	78,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
22	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
23	Kementerian Perdagangan	75,37	Kuning	C	Kualitas Sedang
24	Kementerian Perhubungan	75,02	Kuning	C	Kualitas Sedang
25	Kementerian Pemuda dan Olahraga	70,76	Kuning	C	Kualitas Sedang

b. Tingkat Lembaga

NO	LEMBAGA	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
1	Badan Pusat Statistik	94,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan	94,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Badan Narkotika Nasional	93,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Perpustakaan Nasional Indonesia	90,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Lembaga Sensor Film	88,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Badan Amil Zakat Nasional	88,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Badan Riset dan Inovasi Nasional	87,48	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	LEMBAGA	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
8	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	87,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	85,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10	Kepolisian Negara Republik Indonesia	80,87	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	78,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
12	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	77,89	Kuning	C	Kualitas Sedang
13	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	77,62	Kuning	C	Kualitas Sedang
14	Konsil Kedokteran Indonesia	69,44	Kuning	C	Kualitas Sedang

c. Tingkat Pemerintah Provinsi

NO	PEMERINTAH PROVINSI	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
1	Provinsi Sulawesi Utara	98,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Provinsi Jawa Tengah	98,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Provinsi DI Yogyakarta	97,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Provinsi Bali	96,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Provinsi Riau	96,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Provinsi Sulawesi Tengah	96,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Provinsi Kalimantan Barat	95,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Provinsi Jawa Barat	95,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9	Provinsi Kalimantan Selatan	94,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10	Provinsi Banten	94,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi



NO	PEMERINTAH PROVINSI	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
11	Provinsi Kalimantan Utara	92,92	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12	Provinsi Sumatera Utara	92,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13	Provinsi DKI Jakarta	92,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14	Provinsi Jawa Timur	92,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16	Provinsi Lampung	91,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17	Provinsi Sumatera Barat	91,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18	Provinsi Sulawesi Selatan	91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19	Provinsi Kalimantan Tengah	90,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20	Provinsi Kepulauan Riau	90,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21	Provinsi Gorontalo	90,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22	Provinsi Sulawesi Barat	88,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23	Provinsi Bengkulu	88,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24	Provinsi Aceh	86,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
25	Provinsi Kalimantan Timur	85,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
26	Provinsi Jambi	85,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
27	Provinsi Sumatera Selatan	85,46	Hijau	B	Kualitas Tinggi
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	85,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	77,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
30	Provinsi Maluku	72,44	Kuning	C	Kualitas Sedang
31	Provinsi Sulawesi Tenggara	69,71	Kuning	C	Kualitas Sedang
32	Provinsi Maluku Utara	65,57	Kuning	C	Kualitas Sedang

NO	PEMERINTAH PROVINSI	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
33	Provinsi Papua Barat	58,12	Kuning	C	Kualitas Sedang
34	Provinsi Papua	46,88	Merah	D	Kualitas Rendah

d. Tingkat Pemerintah Kota

NO	PEMERINTAH KOTA	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
1	Kota Magelang	99,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Kota Surakarta	99,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Kota Yogyakarta	98,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Kota Surabaya	98,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kota Pasuruan	98,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kota Blitar	98,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Kota Salatiga	98,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Kota Jakarta Pusat	97,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9	Kota Denpasar	97,93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10	Kota Malang	97,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11	Kota Pekalongan	97,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12	Kota Payakumbuh	97,6	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13	Kota Pekanbaru	97,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14	Kota Metro	97,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15	Kota Semarang	96,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16	Kota Tangerang Selatan	96,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17	Kota Dumai	96,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18	Kota Jakarta Utara	96,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19	Kota Cimahi	96,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20	Kota Lubuklinggau	95,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21	Kota Balikpapan	95,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22	Kota Madiun	95,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KOTA	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
23	Kota Tegal	95,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24	Kota Banjarmasin	95,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25	Kota Cilegon	95,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26	Kota Cirebon	95,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27	Kota Pontianak	94,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28	Kota Tangerang	94,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29	Kota Banjar	94,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30	Kota Depok	94,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31	Kota Padang Panjang	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32	Kota Palu	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33	Kota Bekasi	94,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34	Kota Bandar Lampung	93,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35	Kota Kediri	93,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36	Kota Jambi	93,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37	Kota Padang	93,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38	Kota Sukabumi	93,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39	Kota Singkawang	93,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40	Kota Mataram	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41	Kota Samarinda	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42	Kota Tasikmalaya	93,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43	Kota Binjai	93,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44	Kota Bandung	93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45	Kota Palembang	92,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46	Kota Banjarbaru	92,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47	Kota Prabumulih	92,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48	Kota Sibolga	92,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KOTA	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
49	Kota Jakarta Selatan	92,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50	Kota Mojokerto	92,12	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51	Kota Pematangsiantar	92,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52	Kota Jakarta Timur	91,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53	Kota Banda Aceh	91,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
54	Kota Bogor	91,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
55	Kota Lhokseumawe	91,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
56	Kota Medan	91,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
57	Kota Kotamobagu	91,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
58	Kota Serang	91,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
59	Kota Bitung	91,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
60	Kota Probolinggo	91,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
61	Kota Tarakan	91,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
62	Kota Ambon	91,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
63	Kota Pariaman	90,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
64	Kota Bengkulu	90,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
65	Kota Jakarta Barat	90,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
66	Kota Solok	90,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
67	Kota Pangkal Pinang	90,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
68	Kota Sungai Penuh	90,4	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
69	Kota Bontang	90,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
70	Kota Bima	90,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
71	Kota Sorong	90,2	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
72	Kota Palangka Raya	90,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
73	Kota Bukittinggi	89,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
74	Kota Sawahlunto	89,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KOTA	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
75	Kota Tanjung Pinang	89,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
76	Kota Padangsidempuan	88,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
77	Kota Batam	88,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
78	Kota Jayapura	88,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
79	Kota Gunungsitoli	88,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
80	Kota Langsa	87,51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
81	Kota Kupang	86,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
82	Kota Sabang	86,48	Hijau	B	Kualitas Tinggi
83	Kota Makassar	86,16	Hijau	B	Kualitas Tinggi
84	Kota Manado	86,04	Hijau	B	Kualitas Tinggi
85	Kota Subulussalam	85,78	Hijau	B	Kualitas Tinggi
86	Kota Tomohon	85,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
87	Kota Tanjung Balai	85,52	Hijau	B	Kualitas Tinggi
88	Kota Tidore Kepulauan	84,94	Hijau	B	Kualitas Tinggi
89	Kota Batu	82,28	Hijau	B	Kualitas Tinggi
90	Kota Parepare	81,61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
91	Kota Ternate	80,01	Hijau	B	Kualitas Tinggi
92	Kota Tebing Tinggi	79,81	Hijau	B	Kualitas Tinggi
93	Kota Gorontalo	79,76	Hijau	B	Kualitas Tinggi
94	Kota Tual	79,31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
95	Kota Kendari	75,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
96	Kota Palopo	70,92	Kuning	C	Kualitas Sedang
97	Kota Pagar Alam	67,49	Kuning	C	Kualitas Sedang
98	Kota Baubau	56,07	Kuning	C	Kualitas Sedang

e. Tingkat Pemerintah Kabupaten

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
1	Kabupaten Wonogiri	99,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Kabupaten Sukoharjo	99,36	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Kabupaten Tuban	99,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Kabupaten Rembang	98,9	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kabupaten Tulungagung	98,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kabupaten Bojonegoro	98,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Kabupaten Karanganyar	98,66	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Kabupaten Sragen	98,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9	Kabupaten Pemalang	98,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10	Kabupaten Cilacap	98,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11	Kabupaten Ngawi	98,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12	Kabupaten Jember	98,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13	Kabupaten Banyumas	98,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14	Kabupaten Klaten	98,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15	Kabupaten Sidoarjo	98,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16	Kabupaten Semarang	98,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17	Kabupaten Nganjuk	97,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18	Kabupaten Blora	97,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19	Kabupaten Badung	97,81	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20	Kabupaten Brebes	97,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21	Kabupaten Solok	97,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22	Kabupaten Magetan	97,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23	Kabupaten Bengkalis	97,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24	Kabupaten Kebumen	97,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi



NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
25	Kabupaten Purworejo	97,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26	Kabupaten Pasuruan	97,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27	Kabupaten Grobogan	97,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28	Kabupaten Boyolali	97,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29	Kabupaten Banggai Laut	97,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30	Kabupaten Bantul	97,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31	Kabupaten Kendal	97,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32	Kabupaten Sleman	97,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33	Kabupaten Serdang Bedagai	97,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34	Kabupaten Kulon Progo	97,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35	Kabupaten Temanggung	97,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36	Kabupaten Buleleng	97,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37	Kabupaten Kudus	97,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38	Kabupaten Wonosobo	96,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39	Kabupaten Gianyar	96,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40	Kabupaten Langkat	96,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41	Kabupaten Jepara	96,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42	Kabupaten Bima	96,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43	Kabupaten Tabanan	96,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44	Kabupaten Bangli	96,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	96,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46	Kabupaten Purbalingga	96,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47	Kabupaten Klungkung	96,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48	Kabupaten Jembrana	96,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49	Kabupaten Trenggalek	96,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
50	Kabupaten Ciamis	96,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51	Kabupaten Pekalongan	96,2	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52	Kabupaten Rokan Hulu	96,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53	Kabupaten Demak	96,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
54	Kabupaten Kaur	96,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
55	Kabupaten Madiun	96,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
56	Kabupaten Kediri	95,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
57	Kabupaten Pacitan	95,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
58	Kabupaten Gresik	95,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
59	Kabupaten Banggai	95,83	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
60	Kabupaten Probolinggo	95,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
61	Kabupaten Bangka	95,75	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
62	Kabupaten Agam	95,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
63	Kabupaten Karangasem	95,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
64	Kabupaten Gunungkidul	95,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
65	Kabupaten Pringsewu	95,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
66	Kabupaten Bengkulu Selatan	95,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
67	Kabupaten Pandeglang	95,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
68	Kabupaten Banjarnegara	95,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
69	Kabupaten Bolaang Mongondow	95,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
70	Kabupaten Pinrang	95,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
71	Kabupaten Bandung	94,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
72	Kabupaten Bulungan	94,92	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
73	Kabupaten Dairi	94,83	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
74	Kabupaten Poso	94,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
75	Kabupaten Tapin	94,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
76	Kabupaten Garut	94,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
77	Kabupaten Belitang Timur	94,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
78	Kabupaten Magelang	94,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
79	Kabupaten Malang	94,66	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
80	Kabupaten Lebak	94,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
81	Kabupaten Kaimana	94,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
82	Kabupaten Situbondo	94,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
83	Kabupaten Kutai Kartanegara	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
84	Kabupaten Kampar	94,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
85	Kabupaten Gowa	94,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
86	Kabupaten Purwakarta	94,36	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
87	Kabupaten Lumajang	94,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
88	Kabupaten Blitar	94,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
89	Kabupaten Banjar	94,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
90	Kabupaten Natuna	94,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
91	Kabupaten Tasikmalaya	94,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
92	Kabupaten Tabalong	94,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
93	Kabupaten Bangka Tengah	94,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
94	Kabupaten Bangka Selatan	94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
95	Kabupaten Siak	93,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
96	Kabupaten Kotabaru	93,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
97	Kabupaten Indramayu	93,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
98	Kabupaten Banyuwangi	93,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
99	Kabupaten Mojokerto	93,85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
100	Kabupaten Lebong	93,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
101	Kabupaten Batang	93,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
102	Kabupaten Lamongan	93,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
103	Kabupaten Cirebon	93,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
104	Kabupaten Cianjur	93,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
105	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	93,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
106	Kabupaten Tanah Datar	93,51	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
107	Kabupaten Muna Barat	93,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
108	Kabupaten Way Kanan	93,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
109	Kabupaten Hulu Sungai Utara	93,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
110	Kabupaten Asahan	93,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
111	Kabupaten Musi Banyuasin	93,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
112	Kabupaten Rokan Hilir	93,12	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
113	Kabupaten Subang	93,12	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
114	Kabupaten Barito Kuala	93,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
115	Kabupaten Bombana	93,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
116	Kabupaten Belitung	93,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
117	Kabupaten Rejang Lebong	93,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
118	Kabupaten Majalengka	93,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
119	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	93,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
120	Kabupaten Kubu Raya	93,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
121	Kabupaten Tegal	92,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi



NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
122	Kabupaten Tanah Laut	92,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
123	Kabupaten Sumedang	92,9	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
124	Kabupaten Sukabumi	92,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
125	Kabupaten Bandung Barat	92,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
126	Kabupaten Sumbawa Barat	92,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
127	Kabupaten Kepahiang	92,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
128	Kabupaten Pesisir Selatan	92,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
129	Kabupaten Nias Utara	92,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
130	Kabupaten Bogor	92,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
131	Kabupaten Lingga	92,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
132	Kabupaten Pidie Jaya	92,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
133	Kabupaten Nias	92,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
134	Kabupaten Lampung Tengah	92,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
135	Kabupaten Malinau	92,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
136	Kabupaten Nunukan	92,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
137	Kabupaten Batu Bara	92,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
138	Kabupaten Pati	92,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
139	Kabupaten Sinjai	92,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
140	Kabupaten Pamekasan	92,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
141	Kabupaten Balangan	92,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
142	Kabupaten Serang	91,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
143	Kabupaten Kapuas Hulu	91,9	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
144	Kabupaten Timor Tengah Utara	91,82	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
145	Kabupaten Humbang Hasundutan	91,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
146	Kabupaten Pangandaran	91,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
147	Kabupaten Kepulauan Anambas	91,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
148	Kabupaten Lombok Tengah	91,69	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
149	Kabupaten Musi Rawas	91,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
150	Kabupaten Aceh Timur	91,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
151	Kabupaten Tulang Bawang	91,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
152	Kabupaten Kuantan Singingi	91,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
153	Kabupaten Bireuen	91,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
154	Kabupaten Kutai Barat	91,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
155	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	91,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
156	Kabupaten Simalungun	91,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
157	Kabupaten Bengkulu Tengah	91,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
158	Kabupaten Kuningan	91,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
159	Kabupaten Pasaman	91,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
160	Kabupaten Nias Selatan	91,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
161	Kabupaten Dharmasraya	91,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
162	Kabupaten Tangerang	91,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
163	Kabupaten Aceh Singkil	90,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
164	Kabupaten Tanggamus	90,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
165	Kabupaten Aceh Barat Daya	90,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
166	Kabupaten Kolaka Timur	90,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi



NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
167	Kabupaten Mukomuko	90,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
168	Kabupaten Berau	90,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
169	Kabupaten Minahasa Utara	90,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
170	Kabupaten Sarolangun	90,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
171	Kabupaten Karimun	90,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
172	Kabupaten Maluku Tengah	90,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
173	Kabupaten Mesuji	90,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
174	Kabupaten Lampung Utara	90,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
175	Kabupaten Lampung Timur	90,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
176	Kabupaten Minahasa Selatan	90,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
177	Kabupaten Ogan Komering Ilir	90,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
178	Kabupaten Aceh Besar	90,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
179	Kabupaten Kepulauan Sangihe	90,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
180	Kabupaten Banyuasin	90,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
181	Kabupaten Sumbawa	90,04	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
182	Kabupaten Indragiri Hilir	89,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
183	Kabupaten Ogan Ilir	89,89	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
184	Kabupaten Indragiri Hulu	89,89	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
185	Kabupaten Padang Pariaman	89,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
186	Kabupaten Ketapang	89,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
187	Kabupaten Karawang	89,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
188	Kabupaten Tana Tidung	89,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
189	Kabupaten Manggarai Barat	89,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
190	Kabupaten Sambas	89,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
191	Kabupaten Seluma	89,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
192	Kabupaten Tanah Bumbu	89,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
193	Kabupaten Mempawah	89,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
194	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	89,51	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
195	Kabupaten Aceh Jaya	89,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
196	Kabupaten Lima Puluh Kota	89,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
197	Kabupaten Bintan	89,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
198	Kabupaten Sijunjung	89,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
199	Kabupaten Sampang	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
200	Kabupaten Lombok Timur	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
201	Kabupaten Muara Enim	89,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
202	Kabupaten Sintang	89,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
203	Kabupaten Pelalawan	89	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
204	Kabupaten Aceh Barat	88,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
205	Kabupaten Bener Meriah	88,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
206	Kabupaten Konawe	88,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
207	Kabupaten Pasaman Barat	88,85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
208	Kabupaten Kotawaringin Barat	88,81	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
209	Kabupaten Bangkalan	88,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
210	Kabupaten Pidie	88,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
211	Kabupaten Luwu Utara	88,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
212	Kabupaten Tojo Una-una	88,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
213	Kabupaten Aceh Tengah	88,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
214	Kabupaten Karo	88,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
215	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	88,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
216	Kabupaten Kepulauan Mentawai	88,42	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
217	Kabupaten Bengkulu Utara	88,34	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
218	Kabupaten Batang Hari	88,34	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
219	Kabupaten Morowali Utara	88,29	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
220	Kabupaten Bone	88,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
221	Kabupaten Tapanuli Selatan	88,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
222	Kabupaten Aceh Tamiang	87,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
223	Kabupaten Simeulue	87,91	Hijau	B	Kualitas Tinggi
224	Kabupaten Labuhan Batu Utara	87,89	Hijau	B	Kualitas Tinggi
225	Kabupaten Bekasi	87,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
226	Kabupaten Jombang	87,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
227	Kabupaten Ponorogo	87,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
228	Kabupaten Padang Lawas Utara	87,8	Hijau	B	Kualitas Tinggi
229	Kabupaten Aceh Utara	87,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
230	Kabupaten Polewali Mandar	87,67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
231	Kabupaten Kayong Utara	87,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
232	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	87,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
233	Kabupaten Gayo Lues	87,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
234	Kabupaten Bondowoso	87,53	Hijau	B	Kualitas Tinggi
235	Kabupaten Muaro Jambi	87,5	Hijau	B	Kualitas Tinggi
236	Kabupaten Gorontalo Utara	87,44	Hijau	B	Kualitas Tinggi
237	Kabupaten Ogan Komering Ulu	87,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
238	Kabupaten Biak Numfor	87,37	Hijau	B	Kualitas Tinggi
239	Kabupaten Pesawaran	87,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
240	Kabupaten Deli Serdang	87,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
241	Kabupaten Sanggau	87,28	Hijau	B	Kualitas Tinggi
242	Kabupaten Penajam Paser Utara	87,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
243	Kabupaten Bangka Barat	87,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
244	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	87,2	Hijau	B	Kualitas Tinggi
245	Kabupaten Kepulauan Aru	87,19	Hijau	B	Kualitas Tinggi
246	Kabupaten Banggai Kepulauan	87,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
247	Kabupaten Solok Selatan	87,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
248	Kabupaten Kepulauan Selayar	86,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
249	Kabupaten Majene	86,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
250	Kabupaten Kerinci	86,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
251	Kabupaten Lampung Selatan	86,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
252	Kabupaten Mamuju Tengah	86,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
253	Kabupaten Gunung Mas	86,54	Hijau	B	Kualitas Tinggi
254	Kabupaten Raja Ampat	86,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
255	Kabupaten Luwu Timur	86,4	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
256	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	86,4	Hijau	B	Kualitas Tinggi
257	Kabupaten Aceh Tenggara	86,18	Hijau	B	Kualitas Tinggi
258	Kabupaten Merangin	86,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
259	Kabupaten Tana Toraja	85,89	Hijau	B	Kualitas Tinggi
260	Kabupaten Minahasa Tenggara	85,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
261	Kabupaten Landak	85,76	Hijau	B	Kualitas Tinggi
262	Kabupaten Kepulauan Seribu	85,72	Hijau	B	Kualitas Tinggi
263	Kabupaten Kepulauan Talaud	85,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
264	Kabupaten Kapuas	85,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
265	Kabupaten Pakpak Bharat	85,49	Hijau	B	Kualitas Tinggi
266	Kabupaten Bone Bolango	85,43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
267	Kabupaten Padang Lawas	85,26	Hijau	B	Kualitas Tinggi
268	Kabupaten Kotawaringin Timur	85,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
269	Kabupaten Aceh Selatan	85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
270	Kabupaten Pohuwato	84,83	Hijau	B	Kualitas Tinggi
271	Kabupaten Paser	84,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
272	Kabupaten Sorong	84,75	Hijau	B	Kualitas Tinggi
273	Kabupaten Toba	84,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
274	Kabupaten Soppeng	84,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
275	Kabupaten Tebo	84,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
276	Kabupaten Kolaka	84,43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
277	Kabupaten Mamuju	84,4	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
278	Kabupaten Manokwari	84,34	Hijau	B	Kualitas Tinggi
279	Kabupaten Dompu	84,34	Hijau	B	Kualitas Tinggi
280	Kabupaten Barru	84,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
281	Kabupaten Bungo	84,08	Hijau	B	Kualitas Tinggi
282	Kabupaten Pasangkayu	83,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
283	Kabupaten Toraja Utara	83,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
284	Kabupaten Lombok Barat	83,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
285	Kabupaten Wajo	83,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
286	Kabupaten Belu	83,33	Hijau	B	Kualitas Tinggi
287	Kabupaten Pulang Pisau	83,31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
288	Kabupaten Tapanuli Utara	83,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
289	Kabupaten Sukamara	83,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
290	Kabupaten Manggarai	83,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
291	Kabupaten Kupang	83,17	Hijau	B	Kualitas Tinggi
292	Kabupaten Kolaka Utara	83,15	Hijau	B	Kualitas Tinggi
293	Kabupaten Kepulauan Meranti	83,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
294	Kabupaten Tulang Bawang Barat	83,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
295	Kabupaten Parigi Moutong	82,99	Hijau	B	Kualitas Tinggi
296	Kabupaten Buol	82,93	Hijau	B	Kualitas Tinggi
297	Kabupaten Timor Tengah Selatan	82,87	Hijau	B	Kualitas Tinggi
298	Kabupaten Takalar	82,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
299	Kabupaten Lampung Barat	82,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
300	Kabupaten Jeneponto	82,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
301	Kabupaten Lamandau	82,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
302	Kabupaten Sekadau	82,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
303	Kabupaten Konawe Utara	82,61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
304	Kabupaten Bantaeng	82,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
305	Kabupaten Halmahera Selatan	82,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
306	Kabupaten Samosir	82,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
307	Kabupaten Ende	82,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
308	Kabupaten Boalemo	81,99	Hijau	B	Kualitas Tinggi
309	Kabupaten Empat Lawang	81,93	Hijau	B	Kualitas Tinggi
310	Kabupaten Bulukumba	81,92	Hijau	B	Kualitas Tinggi
311	Kabupaten Toli-toli	81,73	Hijau	B	Kualitas Tinggi
312	Kabupaten Labuhan Batu	81,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
313	Kabupaten Nagan Raya	81,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
314	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	81,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
315	Kabupaten Mappi	81,6	Hijau	B	Kualitas Tinggi
316	Kabupaten Kepulauan Yapen	81,44	Hijau	B	Kualitas Tinggi
317	Kabupaten Bengkayang	81,3	Hijau	B	Kualitas Tinggi
318	Kabupaten Minahasa	81,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
319	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	80,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
320	Kabupaten Manggarai Timur	80,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
321	Kabupaten Nagekeo	80,42	Hijau	B	Kualitas Tinggi
322	Kabupaten Pegunungan Arfak	80,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
323	Kabupaten Luwu	80,2	Hijau	B	Kualitas Tinggi
324	Kabupaten Barito Utara	80,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
325	Kabupaten Sumenep	80,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
326	Kabupaten Katingan	79,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
327	Kabupaten Jayawijaya	79,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
328	Kabupaten Buton Selatan	79,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
329	Kabupaten Sigi	79,5	Hijau	B	Kualitas Tinggi
330	Kabupaten Seruyan	79,19	Hijau	B	Kualitas Tinggi
331	Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan	79,08	Hijau	B	Kualitas Tinggi
332	Kabupaten Mamasa	78,9	Hijau	B	Kualitas Tinggi
333	Kabupaten Sikka	78,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
334	Kabupaten Lahat	78,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
335	Kabupaten Kutai Timur	78,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
336	Kabupaten Buton Tengah	78,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
337	Kabupaten Melawi	78,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
338	Kabupaten Sumba Barat	78,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
339	Kabupaten Mandailing Natal	78,07	Hijau	B	Kualitas Tinggi
340	Kabupaten Maros	77,71	Kuning	C	Kualitas Sedang
341	Kabupaten Buru Selatan	77,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
342	Kabupaten Maluku Barat Daya	77,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
343	Kabupaten Fakfak	77,55	Kuning	C	Kualitas Sedang
344	Kabupaten Lembata	77,55	Kuning	C	Kualitas Sedang
345	Kabupaten Tambrau	77,43	Kuning	C	Kualitas Sedang
346	Kabupaten Sidenreng Rappang	77,16	Kuning	C	Kualitas Sedang

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
347	Kabupaten Muna	77,12	Kuning	C	Kualitas Sedang
348	Kabupaten Halmahera Timur	76,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
349	Kabupaten Gorontalo	76,83	Kuning	C	Kualitas Sedang
350	Kabupaten Mahakam Ulu	76,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
351	Kabupaten Musi Rawas Utara	76,35	Kuning	C	Kualitas Sedang
352	Kabupaten Nias Barat	76,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
353	Kabupaten Murung Raya	75,51	Kuning	C	Kualitas Sedang
354	Kabupaten Barito Selatan	75,46	Kuning	C	Kualitas Sedang
355	Kabupaten Tapanuli Tengah	75,41	Kuning	C	Kualitas Sedang
356	Kabupaten Sumba Barat Daya	75,35	Kuning	C	Kualitas Sedang
357	Kabupaten Enrekang	74,93	Kuning	C	Kualitas Sedang
358	Kabupaten Pesisir Barat	74,87	Kuning	C	Kualitas Sedang
359	Kabupaten Maluku Tenggara	74,61	Kuning	C	Kualitas Sedang
360	Kabupaten Konawe Kepulauan	74,6	Kuning	C	Kualitas Sedang
361	Kabupaten Halmahera Utara	74,26	Kuning	C	Kualitas Sedang
362	Kabupaten Barito Timur	73,52	Kuning	C	Kualitas Sedang
363	Kabupaten Morowali	73,43	Kuning	C	Kualitas Sedang
364	Kabupaten Flores Timur	73,3	Kuning	C	Kualitas Sedang
365	Kabupaten Sorong Selatan	72,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
366	Kabupaten Buton Utara	72,87	Kuning	C	Kualitas Sedang
367	Kabupaten Buton	72,4	Kuning	C	Kualitas Sedang
368	Kabupaten Lombok Utara	72,24	Kuning	C	Kualitas Sedang

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
369	Kabupaten Seram Bagian Timur	71,4	Kuning	C	Kualitas Sedang
370	Kabupaten Sabu Raijua	71,02	Kuning	C	Kualitas Sedang
371	Kabupaten Wakatobi	70,53	Kuning	C	Kualitas Sedang
372	Kabupaten Sumba Tengah	70,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
373	Kabupaten Rote Ndao	69,73	Kuning	C	Kualitas Sedang
374	Kabupaten Sumba Timur	69,68	Kuning	C	Kualitas Sedang
375	Kabupaten Halmahera Barat	68,7	Kuning	C	Kualitas Sedang
376	Kabupaten Halmahera Tengah	67,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
377	Kabupaten Donggala	64,55	Kuning	C	Kualitas Sedang
378	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	64,36	Kuning	C	Kualitas Sedang
379	Kabupaten Ngada	64,31	Kuning	C	Kualitas Sedang
380	Kabupaten Seram Bagian Barat	63,75	Kuning	C	Kualitas Sedang
381	Kabupaten Konawe Selatan	63,7	Kuning	C	Kualitas Sedang
382	Kabupaten Alor	63,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
383	Kabupaten Jayapura	63,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
384	Kabupaten Pulau Morotai	62,39	Kuning	C	Kualitas Sedang
385	Kabupaten Malaka	62,3	Kuning	C	Kualitas Sedang
386	Kabupaten Kepulauan Sula	62,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
387	Kabupaten Keerom	60,95	Kuning	C	Kualitas Sedang
388	Kabupaten Mimika	59,99	Kuning	C	Kualitas Sedang
389	Kabupaten Buru	59,86	Kuning	C	Kualitas Sedang
390	Kabupaten Merauke	59,03	Kuning	C	Kualitas Sedang

NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
391	Kabupaten Puncak Jaya	57,44	Kuning	C	Kualitas Sedang
392	Kabupaten Yahukimo	57,38	Kuning	C	Kualitas Sedang
393	Kabupaten Pulau Taliabu	55,65	Kuning	C	Kualitas Sedang
394	Kabupaten Supiori	54,04	Kuning	C	Kualitas Sedang
395	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	50,47	Merah	D	Kualitas Rendah
396	Kabupaten Nabire	48,74	Merah	D	Kualitas Rendah
397	Kabupaten Lanny Jaya	44,17	Merah	D	Kualitas Rendah
398	Kabupaten Puncak	40,54	Merah	D	Kualitas Rendah
399	Kabupaten Manokwari Selatan	40,42	Merah	D	Kualitas Rendah
400	Kabupaten Asmat	38,59	Merah	D	Kualitas Rendah
401	Kabupaten Boven Digoel	38,03	Merah	D	Kualitas Rendah
402	Kabupaten Paniai	37,38	Merah	D	Kualitas Rendah
403	Kabupaten Teluk Bintuni	35,38	Merah	D	Kualitas Rendah
404	Kabupaten Waropen	35,21	Merah	D	Kualitas Rendah
405	Kabupaten Mamberamo Raya	34,48	Merah	D	Kualitas Rendah
406	Kabupaten Teluk Wondama	32,66	Merah	D	Kualitas Rendah
407	Kabupaten Yalimo	32,66	Merah	D	Kualitas Rendah
408	Kabupaten Maybrat	31,98	Merah	E	Kualitas Terendah
409	Kabupaten Tolikara	30,83	Merah	E	Kualitas Terendah
410	Kabupaten Dogiyai	28,62	Merah	E	Kualitas Terendah
411	Kabupaten Sarmi	26,64	Merah	E	Kualitas Terendah
412	Kabupaten Intan Jaya	22,98	Merah	E	Kualitas Terendah



NO	PEMERINTAH KABUPATEN	NILAI	ZONA	KATEGORI	OPINI
413	Kabupaten Nduga	22,48	Merah	E	Kualitas Terendah
414	Kabupaten Pegunungan Bintang	22,05	Merah	E	Kualitas Terendah
415	Kabupaten Deiyai	21,06	Merah	E	Kualitas Terendah
416	Kabupaten Mamberamo Tengah	11,16	Merah	E	Kualitas Terendah



TESTIMONI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara



Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga perlunya menata berbagai aspek birokrasi yang termasuk didalamnya aspek pelayanan publik. Melalui visi Kepala Daerah *“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”* dan dalam misi kelima yakni *“Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah”* terlihat jelas arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan komitmen dan kerja keras Kepala Daerah, Sulawesi Utara berhasil meraih predikat terbaik pertama dari 34 provinsi terhadap Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN RI dalam 2 (dua) tahun berturut turut pada tahun 2022 dan 2023. Prestasi ini bukanlah hal yang mudah, perlunya komitmen dan sinergitas serta konsistensi setiap stakeholder pelayanan publik juga tidak lepas dari intensitas dan keaktifan OMBUDSMAN RI maupun Perwakilan dalam memberi pendampingan.

Disamping itu pula untuk meraih penghargaan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang menjadi kiat-kiat sukses dalam pencapaian antara lain : **Pertama**, contoh dan teladan Kepala Daerah beserta jajarannya menjadi cermin dan semangat integritas pelayanan; **Kedua**, terus melakukan pembenahan internal mulai dari aspek kebijakan, sarana prasarana sampai pada sumber daya manusia pengelola pelayanan publik; **Ketiga**, meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama

dengan Ombudsman RI melalui Perwakilan yang ada untuk mendapatkan panduan maupun saran yang objektif terkait apa saja yang menjadi kekurangan; **Keempat**, menerapkan kedisiplinan sesuai ketentuan dan hasil saran.

Setiap tahapan dan pencapaian tersebut, diharapkan menjadi *Endorsment* bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kedepan untuk mempertahankan kinerja pelayanan publik dan juga mempertahankan prestasi ditahun 2024 serta memberikan semangat bagi kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara bahkan pemerintah se Indonesia. Dengan harapan pelayanan publik bukan hanya untuk memenuhi prestasi penilaian semata namun menjadi karakter yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima.

Pemerintah Kota Magelang



Pemerintah Kota Magelang meyakini bahwa perbaikan pelayanan publik akan berbanding lurus (*linear*) dengan capaian kinerja lainnya, terbukti pada tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kota Magelang mendapatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI adalah 95,10 dan **98,17 predikat tertinggi (zona hijau)** berbanding lurus dengan capaian kinerja Indeks Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 sebesar 72,12 dan di tahun 2024 adalah 75,02 dengan predikat **"Sangat Baik"** .

Kemudian untuk Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2023 sebesar 84,85 naik signifikan 16,61point dari tahun 2022 sebesar 68,24 dengan **kriteria "memuaskan"**. Berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Magelang tahun 2022 dan 2023 adalah 82,85 dan 86,43 dengan **predikat "Baik"**, semua

ini adalah bukti nyata bahwa peningkatan kualitas publik akan meningkatkan trends kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Adapun upaya dilakukan Pemerintah Kota Magelang sehingga dapat mempertahankan dan kualitas pelayanan publik adalah:

1. Melanjutkan komitmen Kepala Daerah dan semua unit pelayanan publik (UPP) untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kota Magelang sekaligus mematuhi standar pelayanan publik agar tidak terjadi maladministrasi sehingga dari perbaikan terus menerus atas kualitas pelayanan publik berdampak dan bermanfaat langsung kepada masyarakat;
2. Selalu meningkatkan kualitas serta prioritas layanan publik inklusif kepada masyarakat yang rentan, difabel, inferior dan marginal agar mendapatkan pelayanan publik yang optimal sesuai standar pelayanan dan standar kepatuhan pelayanan publik;
3. Memonitoring dan mengevaluasi atas semua Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh semua Unit Pelayanan Publik (UPP) baik dikriteria *service delivery* maupun *manufacture* secara periodik. Dan memastikan seluruh Penyelenggara Pelayanan Publik mentaati serta mempedomani Standar Pelayanan yang sudah disusun berdasarkan hasil dari Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diikuti oleh seluruh *stakeholder* (Masyarakat, Penggunaa layanan, *customer*, pelanggan);

Melakukan dan menindaklanjuti terhadap program dan kegiatan dalam MOU yang sudah dilakukan antara Walikota Magelang dan Ketua Ombudsman RI, sehingga pelayanan publik di Kota Magelang tidak akan terjadi Maladministrasi maupun tidak mematuhi terhadap standar kepatuhan atas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

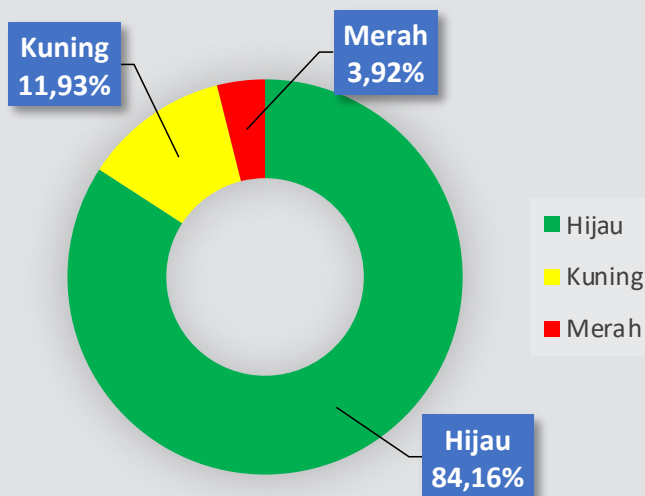
Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wonogiri berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian nilai kepatuhan Tahun 2023 Kabupaten Wonogiri telah mendapatkan nilai 95,91 (A = Kualitas Tertinggi, Kategori Hijau) namun demikian Bupati Wonogiri berkomitmen untuk terus memacu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada semua OPD Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Puskesmas.
2. Pendampingan dan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
3. Bimbingan teknis penyusunan Standar Pelayanan Publik oleh Bagian Organisasi Kabupaten Wonogiri.
4. Pembinaan langsung ke OPD (unit pelayanan) oleh Bagian Organisasi Kabupaten Wonogiri.
5. Peningkatan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi MPP Digital yang telah mengintegrasikan 16 jenis pelayanan secara online dan terus akan dikembangkan.
6. Mendorong dan meningkatkan fungsi berbagai aplikasi hasil inovasi di OPD terutama yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat, misalnya inovasi Telunjuk Sakti untuk Layanan Adminduk, dll.
7. Terus mendorong meningkatnya nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
8. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait dengan pelayanan publik yang prima.

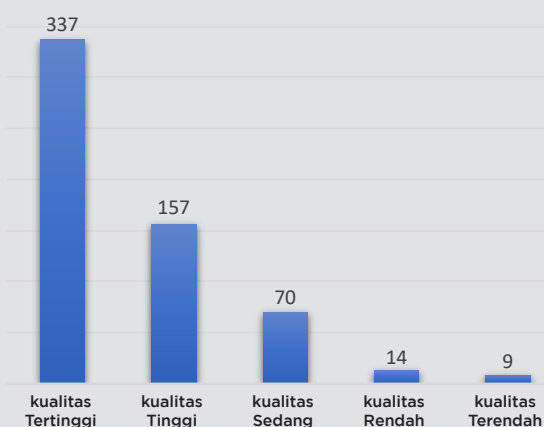
9. Menyelenggarakan Wonogiri *Inovation Award* (WIA).
10. Penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Berbagai kegiatan tersebut di atas menunjukkan kualitas pelayanan publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat bergerak positif serta nilai Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI di Kabupaten Wonogiri juga terus meningkat.



Jumlah Zona Kepatuhan 2024	Total	%
Hijau	494	84,16%
Kuning	70	11,93%
Merah	23	3,92%
Total	587	100,00%

Jumlah Entitas Berdasarkan Opini Tahun 2024



Jumlah Opini 2024	Total	%
Kualitas Tertinggi	337	57,41%
Kualitas Tinggi	157	26,75%
Kualitas Sedang	70	11,93%
Kualitas Rendah	14	2,39%
Kualitas Terendah	9	1,53%
Total	587	100,00%

Hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 secara nasional menunjukkan peningkatan yang sangat baik terlihat dari meningkatnya jumlah pada zona hijau dan turunnya jumlah pada zona kuning dan merah. Tentunya peningkatan ini tidak terlepas dari komitmen dan keinginan penyelenggara layanan untuk melakukan perubahan dalam pelayanan publik dimana diimplementasikan ke dalam pemenuhan standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan. Dengan konsep penilaian yang telah disempurnakan selama 3 (tiga) tahun ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman akan pentingnya standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan serta mendorong penyelenggara layanan untuk selalu melakukan evaluasi atas pelayanan yang telah diselenggarakan.

Pada tahun 2024 ini untuk Kabupaten Puncak telah dapat dilakukan penilaian sehingga untuk Pemerintah Kabupaten telah seluruhnya dilakukan penilaian, tentunya hal ini tercapai berkat kerjasama yang baik antara Ombudsman Perwakilan Papua dengan Pemerintah Kabupaten Puncak. Untuk 4 (empat) Pemerintah Provinsi Baru yaitu Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya belum dapat dilakukan penilaian dikarenakan belum tersedianya unit layanan yang memadai.

Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di tahun ini juga disinergikan dengan produk pengawasan ombudsman yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi. Hal ini dilakukan guna untuk pencegahan maladministrasi dan perbaikan pelayanan publik yang baik, sehingga bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam zona hijau dan tidak/belum melaksanakan produk Ombudsman tidak dapat menerima piagam penghargaan penilaian kepatuhan tahun 2024.

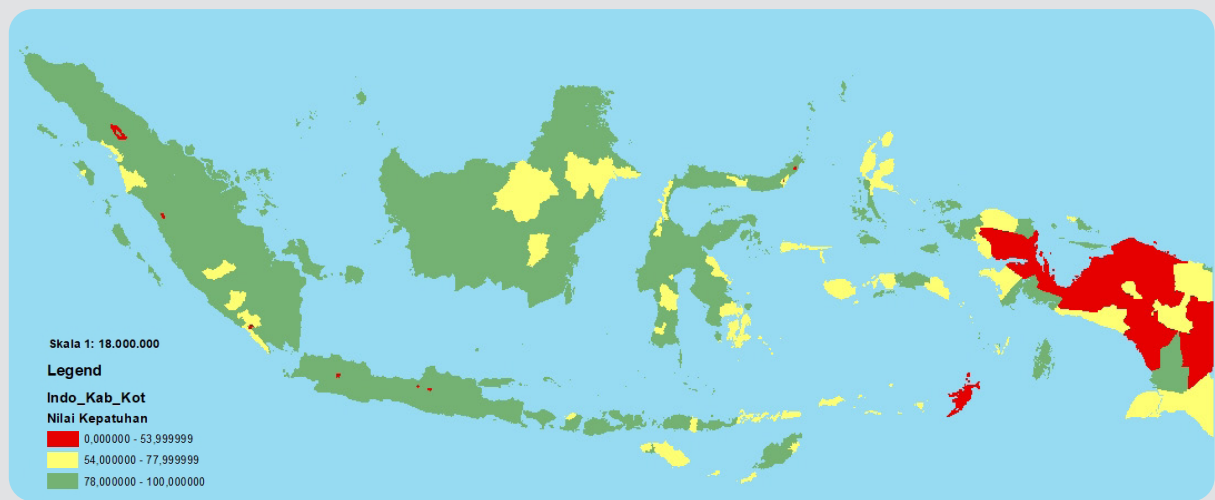


PETA SEBARAN BERDASARKAN ZONASI PADA PEMDA (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)

SEBARAN NILAI KEPATUHAN PEMERINTAH TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024



SEBARAN NILAI KEPATUHAN PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN KOTA TAHUN 2024





SARAN KE DEPAN

Atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2024, Ombudsman RI memberikan sejumlah saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi. Adapun saran Ombudsman sebagai berikut:

1. Kepada Presiden, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri:
 - a. Mendorong setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik.
 - a. Melakukan evaluasi dan pengawasan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Kepada Menteri Sektor, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota
 - a. Memberikan apresiasi (*award*) kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau. Apresiasi tersebut, dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi dan memahami komponen standar pelayanan serta telah membuat unit pengelola pengaduan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - b. Memberikan pembinaan, teguran dan mendorong implementasi, pemahaman atas komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah dan zona kuning.

- c. Memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik dimana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna memantau hal tersebut maka disarankan untuk menunjuk pejabat yang berwenang.
- d. Menjalankan setiap tindakan korektif yang terkandung dalam Laporan Akhir Pemeriksaan (LHP) dan Rekomendasi maupun Saran Perbaikan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diberikan oleh Ombudsman RI sebagai produk yang mengikat dan wajib dipatuhi.



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



137



0821 3737 3737



OmbudsmanRI137



pengaduan@ombudsman.go.id



www.ombudsman.go.id

